

# Buletin La'o Hamutuk

Vol. 5, No. 2

Maret 2004

Artikel pembahasan batas perairan dan konsekuensi pembangunan minyak, hal. 4-7.

## Tujuh Opsi untuk Menutup Kesenjangan Keuangan Timor Lorosa'e

**K**esenjangan Keuangan di Timor Lorosa'e bukanlah kesenjangan, tetapi defisit anggaran selama empat tahun yang akan datang, yang sekarang diperkirakan mencapai 126,3 juta Dolar Amerika hingga penghasilan dari minyak dan gas (migas) mulai masuk pada tahun 2007. Berarti bahwa uang pemerintah tidak cukup untuk menutup semua pengeluarannya selama periode ini. Konsekuensi paling penting dan paling cepat dirasakan dari kekurangan uang ini adalah bahwa pemerintah tidak akan bisa membiayai pelayanan-pelayanan pokok, dan ini bisa menyebabkan ketidakstabilan.

### Mengapa ada defisit anggaran?

Defisit anggaran adalah sesuatu yang cukup mengkuatirkan bagi Timor Lorosa'e, mengingat faktor-faktor berikut ini, yaitu: masyarakat internasional telah mengeluarkan banyak uang di Timor Lorosa'e sejak tahun 1999; para pakar internasional dari PBB, lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang mengelola negara ini sampai tahun 2002 dan tetap mempertahankan kehadiran-mereka yang cukup berarti dengan saran-sarannya. Timor Lorosa'e dalam waktu dekat akan mempunyai akses pada sumber daya alam yang sangat menguntungkan di Laut Timor. Dua pertanyaan adalah bagaimana caranya agar negara ini bisa menjembatani defisit anggaran ini? Dan mengapa, pada saat ini, negara ini tidak bisa membiayai anggaran nasionalnya sendiri yang cukup minim?

Para penyandang dana dan pemerintah Timor Lorosa'e mengidentifikasi defisit anggaran ini hampir setahun yang lalu. *La'o Hamutuk* melaporkan tentang masalah-masalah yang akan dialami oleh anggaran nasional di masa depan yang disebabkan masalah-masalah teknis di Ladang Minyak Bayu-Undan, pada Bulan Agustus tahun lalu (Lihat *Buletin La'o Hamutuk Vol. 4, No. 3-4*). Akan tetapi, penyebab utama defisit anggaran adalah karena Timor Lorosa'e tertunda menerima penghasilan dari Ladang minyak Laminaria-Corallina, yang merupakan milik Timor Lorosa'e di bawah

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Prinsip-Prinsip Hukum Kelautan. Australia telah mengumpulkan lebih dari 1 milyar Dolar Amerika dalam penghasilannya dari Laminaria-Corallina, dan jumlah tersebut cukup untuk menutup kekurangan lebih dari delapan kali defisit anggaran yang ada. Lebih lanjut, oleh karena sebagian besar penghasilan minyak untuk Timor Lorosa'e akan berasal dari satu Ladang, Bayu-Undan, maka negara ini akan tetap rentan untuk mengalami masalah-masalah penjadwalan atau produksi di ladang minyak itu.

Para perencana internasional juga bisa disalahkan. Mereka melandaskan perkiraan penghasilan jangka panjang Timor Lorosa'e pada jadwal yang direncanakan oleh ConocoPhillips. Jadwal perusahaan minyak tidak bisa dianggap sebagai jadwal tetap. Kalau pakar-pakar internasional mengerti lebih banyak tentang praktek di industri migas, mungkin pemerintah Timor Lorosa'e bisa melakukan persiapan untuk menghadapi kesulitan anggaran, dan meminta para penyandang dana untuk memperpanjang dukungan keuangan mereka tiga tahun lalu. Sejak itu, dunia ini sudah mengalami banyak perubahan, terutama peristiwa yang sangat menyedihkan yaitu tanggal 11 September 2001 dan perang selanjutnya yang dipimpin Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak. Timor Lorosa'e semakin bukan prioritas bagi para penyandang dana, dan kesadaran tentang apa yang sedang terjadi di Timor Lorosa'e juga makin sedikit. Prioritas para penyandang dana sekarang sudah beralih ke tempat lain.

Kurang lebih 3 milyar Dolar Amerika yang dikeluarkan masyarakat internasional untuk rekonstruksi Timor Lorosa'e sejak tahun 1999, tidak banyak berarti untuk ekonomi setempat. Sebagian besar uang itu tidak dihabiskan di Timor Lorosa'e, tetapi digunakan untuk membiayai PKF dan Polisi

(Lanjutan ke halaman 2)



### Daftar isi . . .

Pemutarbalikkan Fakta oleh Australia .....	4
Pembahasan Batas Perairan Berjalan Lamban .....	5
Korban Industri Minyak dan Gas .....	6
"Dunia Yang Lain itu Mungkin" .....	8
Lowongan pekerjaan .....	10
Editorial: Estadus Unidus Tenki Respeita Soberania Ema Irake No Paz Global .....	12

La'o Hamutuk, Institut Pemantau dan Rekonstruksi Timor Lorosa'e

P.O. Box 340, Dili, Timor Lorosa'e (via Darwin, Australia)

Mobile: +(670)723-4330 Telepon: +(670)3325-013 Fax: +(670)3317-294

Email: laohamutuk@easttimor.minihub.org Situs/Web: http://www.etan.org/lh

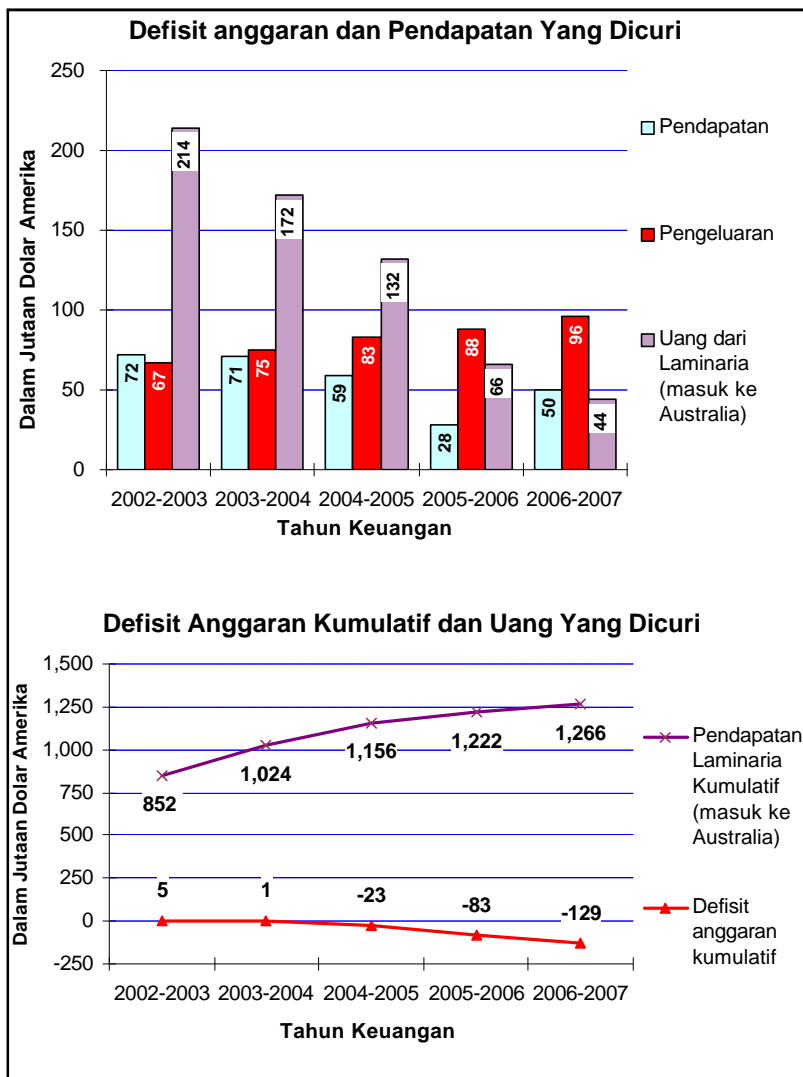


Diagram yang lebih tinggi menunjukkan pendapatan dan pengeluaran tahunan Pemerintah Timor Lorosa'e yang diperkirakan dan pendapatan nyata dan pendapatan Australia dari ladang minyak Laminaria-Corallina. Setiap tahunnya, perbedaan antara batang di sebelah kiri (pendapatan) dan batang di tengah (pengeluaran) menggambarkan deficit – jika pengeluaran-pengeluaran lebih tinggi daripada pendapatan, pemerintah memerlukan uang lebih banyak. Anggaran pengeluaran bertambah sedikit demi sedikit untuk masing-masing tahun keuangan, sebagai pengeluaran yang normal, tetapi anggaran pendapatan turun drastis dari tahun 2004 hingga tiga tahun ke depan, karena uang dari penyandang dana turun dan pendapatan dari pajak pengolahan Bayu-Undan turun. Dari tahun 2006 ke depan, pendapatan bertambah dari produksi minyak Bayu-Undan.

Batang ketiga (ungu) menjelaskan apakah Pemerintah Australia menerima pendapatan dari Laminaria-Corallina, di wilayah perselisihan tetapi lebih dekat ke Timor Lorosa'e daripada Australia. Penurunan pendapatan masing-masing tahun ini karena kebanyakan minyak dari ladang minyak Laminaria telah terjual. Australia menerima 638 Dolar Amerika antara tahun 1999 dan 2002, tidak ditunjukkan di grafik. Timor Lorosa'e tidak menerima satu sen pun.

Grafik yang lebih rendah menunjukkan anggaran total deficit dan pendapatan ladang minyak Laminaria, dengan masing-masing tahun ditambahkan pada jumlah yang terakumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Jelas bahwa Australia akan mencuri uang dari ladang minyak Laminaria sebesar 1.266 milyar Dolar Amerika hingga tahun 2007 yang dapat digunakan membayar deficit anggaran Timor Lorosa'e sebesar 129 juta Dolar Amerika beberapa kali lebih banyak.

PBB. Konsultan asing, gaji untuk staf internasional, kontraktor asing dan persediaan yang dibeli dari luar Timor Lorosa'e menghabiskan jumlah terbesar dari sisa uang itu.

### Opsi-Opsi yang Diusulkan

Dalam artikel ini, kami akan mencoba untuk menganalisa ketujuh Opsi untuk menutup kesenjangan, yang diusulkan dan didiskusikan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Tidak cukup satu opsi saja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak mungkin untuk memilih satu pilihan dan melupakan opsi yang lain; apa yang diperlukan adalah suatu kombinasi antara opsi-opsi tersebut.

Usulan pertama adalah mengurangi pengeluaran pemerintah. Kalau kita mengingat bahwa biaya hidup di Timor Lorosa'e cukup tinggi, memotong pengeluaran akan berarti mengurangi jumlah pegawai negeri atau mengurangi gaji mereka; setiap tahun pemerintah mengeluarkan 27,25 juta Dolar Amerika untuk 17.150 pegawai negeri, dan rata-rata gaji bulanan mereka adalah 132 Dolar Amerika. Pengeluaran bisa dikurangi lebih banyak lagi di sektor-sektor tertentu, seperti kesehatan dan pendidikan, atau dengan mengurangi biaya transportasi. Tidak ada banyak kesempatan untuk memotong pengeluaran pemerintah tanpa berdampak secara negatif pada pelayanan-pelayanan pokok.

Menjual kendaraan yang disumbangkan oleh PBB adalah ide ke-dua. Pemerintah sekarang mencoba untuk menjual 600 *Tata Sumo* di Timor Lorosa'e dengan harga 1.000-3.000 Dolar Amerika per/unit. Pemerintah juga ingin menjual 400 *Land Rover* dengan harga kira-kira 6.000 Dolar Amerika per/unit. Meskipun pemerintah memperkirakan penghasilan dari

penjualan kendaraan-kendaraan tersebut akan menghasilkan 4,2 juta Dolar Amerika, akan tetapi IMF memperkirakan jumlah itu jauh lebih rendah - hanya 1 juta Dolar Amerika.

Kemungkinan ke-tiga adalah para penyandang dana bisa melanjutkan atau meningkatkan dukungan keuangan mereka melalui Program Dukungan Transisi (TSP), yang dipantau oleh Bank Dunia dan telah dimulai pada tahun 2002. Pada Pertemuan Mitra Pembangunan Penyandang Dana pada Bulan Desember 2003, pemerintah mendorong para penyandang dana untuk memperpanjang dukungan mereka untuk TSP, melewati jangka waktu yang pertama disetujui (2002-2005), hingga tahun 2008. Bila para penyandang dana tetap memberikan dukungan seperti sekarang (25 juta Dolar Amerika 2004-5 dan 18 juta Dolar Amerika 2005-6), ini akan mengurangi kekurangan uang sejumlah 43 juta Dolar Amerika.

Pilihan ke-empat adalah untuk “meluruskan kembali” dukungan bilateral dan multilateral menurut prioritas pemerintah sebagaimana didefinisikan dalam Program Pengeluaran Sektor/*Sectoral Expenditure Program* (SEP) (juga disebut *Sector Investment Program* (SIP)). Menurut Daftar Bantuan Luar Negeri, proyek-proyek bilateral and multilateral, baik yang berjalan sekarang maupun yang direncanakan, mencapai lebih dari 230 juta Dolar Amerika.

SEP adalah perincian investasi dan pengeluaran menurut sektor. SEP mencakup pendidikan dan pelatihan; kesehatan; pertanian dan peternakan; sumber daya alam dan lingkungan hidup; telekomunikasi, tenaga listrik, transportasi; air bersih dan sanitasi, dan pengembangan di sektor swasta. Dengan melakukan koordinasi yang lebih dekat antara proyek-proyek penyandang

dana bilateral dan multilateral sebagaimana digarisbesarkan dalam Rencana Pembangunan Nasional, pemerintah berharap bisa menggunakan uang penyandang dana untuk menggantikan beberapa pengeluaran yang sudah ada dalam anggaran nasional.

Usulan ke-lima adalah untuk meningkatkan penghasilan dari dalam negeri, yang sekarang berjumlah kira-kira 20 juta Dolar Amerika per-tahun. Meskipun ada kemungkinan untuk melakukan ini, kemungkinan besar tidak akan berdampak besar. Pokok pajak sekarang cukup kecil dan pemerintah harus mempertimbangkan manfaat dan kelemahan dari peningkatan tarif impor dan ekspor, dengan dampaknya pada ekonomi negara. Penting untuk diingat bahwa kebanyakan orang di sini yang mendapatkan gaji yang sangat tinggi dan bisa memberikan kontribusi besar pada anggaran nasional melalui pajak pendapatan, adalah staf PBB, kontraktor PBB, konsultan, diplomat, atau staf internasional dari lembaga-lembaga internasional, tetapi mereka justru tidak diwajibkan untuk membayar pajak pendapatan.

Pilihan ke-enam adalah untuk menggunakan uang minyak dari Rekening Cadangan Laut Timor, yang sekarang berjumlah 10,5 juta Dolar Amerika dan dapat meningkat hingga 90 juta Dolar Amerika hingga tahun 2007. Pajak yang dihasilkan dari operasional-operasional di Laut Timor sudah dipakai sebagai bagian dari anggaran pemerintah, tetapi honorarium (uang sewa yang dibayarkan kepada Timor Lorosa'e untuk minyak dan gas yang telah diolah dan dijual) direncanakan akan disimpan untuk diberikan kepada generasi-generasi yang akan datang. Sekarang ini, tidak ada regulasi yang mengatur cadangan ini, dan uang itu disimpan dalam rekening terpisah di Otoritas Perbankan dan Pembayaran, untuk kemudian ditransfer ke Rekening Cadangan Minyak. Ada kemungkinan untuk menggunakan uang itu untuk menutup kekurangan uang ini, tetapi kalau itu terjadi akan menjadi contoh yang berbahaya, dan bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk menyimpan dan menanamkan modal hak Timor Lorosa'e atas minyak untuk beberapa waktu setelah semua minyak sudah terjual. Tanpa perlindungan hukum, masa depan jangka panjang Timor Lorosa'e bisa terbuang sia-sia hanya untuk menyelesaikan masalah jangka pendek.

Kemungkinan ke-tujuh adalah untuk meminjam uang, mungkin dari Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia (ADB). (Tetapi biasanya IMF yang memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami kekurangan uang sementara waktu). Semua pinjaman kepada negara-negara miskin seperti Timor Lorosa'e mempunyai syarat-syarat yang harus menjadi bagian dari rencana-rencana pembangunan, seperti Program Pengurangan Kemiskinan dari Bank Dunia (PRSP), atau Program Bantuan Kenegaraan dari ADB.

Bank Dunia sudah mengatakan bahwa Timor Lorosa'e tidak akan memerlukan PRSP, karena Timor Lorosa'e sudah mempunyai Rencana Pembangunan Nasional. Akan tetapi, kalau Timor Lorosa'e meminjam, Bank Dunia akan mempunyai pengaruh jauh lebih besar pada perancangan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai prioritas-prioritas sebagaimana ditentukan dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Setiap tahun pemerintah menentukan sasaran-sasaran untuk tindakan-tindakannya. Bank Dunia memantau kemajuan pemerintah dalam mencapai sasaran-sasarannya, sebagai bagian dari Program Dukungan Transisi. Meminjam uang akan memperpanjang proses ini selama masa waktu pinjaman, dan memberikan Bank Dunia peranan yang lebih besar untuk menentukan bagaimana pemerintah harus merancang dan melaksanakan anggaran nasionalnya.

## What do IFIs Want?

Lembaga-lembaga Keuangan internasional (IFI) seperti Bank Dunia dan ADB memandang pembangunan dari satu sisi saja. Mereka mengutamakan pertumbuhan ekonomi, dengan mengorbankan kebutuhan-kebutuhan sosial. Mereka mendukung kebijakan-kebijakan untuk merangsang sektor swasta, seperti pemungutan pajak yang rendah dalam negeri, tarif impor dan ekspor yang rendah, dan mekanisme-mekanisme yang cukup terbatas untuk melindungi buruh.

IFI mendorong perusahaan-perusahaan sektor swasta untuk menjadi pemasok jasa umum seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, infrastruktur dan listrik. Peran sektor swasta dalam menyediakan pelayanan-pelayanan umum seringkali berdampak negatif pada kaum miskin, dan manfaat-manfaatnya cukup meragukan (lihat *Buletin La'o Hamutuk* Editorial Vol. 4, No. 5).

IFI memandang pembangunan dari sisi 'satu model bagi semua'. Mereka tidak terbuka pada perubahan atau ide yang menyangkal model pembangunan mereka. Pemerintah yang meminjam uang dari mereka biasanya cukup terbatas untuk menyelesaikan sendiri masalah-masalah pembangunan mereka secara kreatif dan layak. Meminjam uang berarti memberikan kontrak kepada IFI untuk menjadi 'polisi kebijakan pembangunan' selama masa waktu pinjaman. Ada contoh negara-negara dengan sistem-sistem kesehatan, pendidikan dan pertanian yang baik tanpa bantuan dari Bank Dunia.

## Pinjaman Bank Dunia

Besarnya dan masa waktu suatu pinjaman diputuskan menurut keperluan negara masing-masing. Menurut kriteria dari Bank Dunia, Timor Lorosa'e sekarang bisa mengakses 5 juta Dolar Amerika per-tahun sebagai uang bantuan (sekarang uang ini digunakan untuk Program Dukungan Transisi) dan 9,3 juta Dolar Amerika dalam bentuk pinjaman. Timor Lorosa'e dapat memilih untuk meminjam dengan alokasi waktu satu tahun atau beberapa tahun. Untuk setiap pinjaman ada biaya awal, dengan jumlah total 1,25% dari pinjaman awal itu. Timor Lorosa'e tidak diwajibkan untuk membayar kembali pinjaman selama sepuluh tahun pertama, tetapi seluruh pinjaman itu harus dibayar kembali dalam waktu empat puluh tahun. Untuk informasi lebih lanjut tentang pinjaman dari Bank Dunia dan ADB, lihat *Buletin La'o Hamutuk* Vol. 4 No 1.

## Kesimpulan

Masyarakat internasional mempunyai tanggung jawab untuk mendukung Timor Lorosa'e dalam jangka panjang. Selama 24 tahun, masyarakat internasional memungkinkan dan memperbolehkan pendudukan kejam Indonesia – dan negara-negara seperti Australia dan Amerika Serikat secara aktif mendukung pendudukan itu. Masyarakat internasional tidak mengutuk taktik-taktik pengertakan Australia dalam urusan Laut Timor atau sikap keras Australia tentang batas perairan. Ladang minyak *Laminaria-Corallina* yang merupakan milik Timor Lorosa'e menurut prinsip-prinsip internasional, mendekati akhir produksinya. Ladang ini sudah menghasilkan lebih dari satu milyar Dolar Amerika untuk keuangan nasional Australia. Uang ini milik Timor Lorosa'ed dan dengan uang ini bisa digunakan untuk menutup kekurangan uang dan negara kita tidak perlu mempertimbangkan untuk memotong pelayanan-pelayanan umum yang penting, atau meminjam uang dalam waktu kurang dari dua tahun setelah kemerdekaan kita. ❖

# Pemutarbalikkan Fakta oleh Australia

Pada Hari Nasional Australia, para pendukung Timor Lorosa'e menghubungi Pemerintah Australia untuk menyarankannya menghormati kedaulatan Timor Lorosa'e. Australia seringkali mengulangi, menjelaskan pandangannya dan memutarbalikkan fakta. Berikut di bawah ini salah satu contohnya.



## AUSTRALIAN HIGH COMMISSION: LONDON

TEL: 0207 379 4334  
DIRECT ENQUIRY: 0207 887 5589

AUSTRALIA HOUSE, THE STRAND  
LONDON WC2B 4LA

10 Pebruari 2004

Bpk Paul Barber  
25 Plovers Way  
Hants GU34 2JJ

Yang Terhormat Bpk Barber,

Terima kasih untuk surat anda tertanggal 26 Januari kepada Komisaris Tinggi yang menyatakan pandangan anda mengenai negosiasi batas perairan permanen antara Australia dan Timor Lorosa'e. Komisaris Tinggi telah minta kepada saya untuk mengambil kesempatan yang baik ini untuk menerangkan posisi Australia dan meralat beberapa kesalahan informasi yang telah tersebar luas mengenai isu ini.

Australia mengakui tanpa keberatan atas kewajiban kami, sebagaimana tercantum dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, untuk menentukan batas perairan kami dengan Timor Lorosa'e. Pembahasan awal mengenai batas perairan dilaksanakan di Darwin pada Bulan Nopember 2003. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa penentuan batas-batas perairan bisa menjadi praktek yang rumit dan memakan waktu karena kompleksitas hukum dan teknis mengenai persoalan yang dipertaruhkan ini. Australia melakukan pendekatan terhadap proses isu ini dengan kehendak yang baik.

Meskipun negosiasi mengenai batas perairan permanen bisa memakan beberapa lama, Timor Lorosa'e telah berupaya untuk memperoleh keuntungan dari pengembangan sumber daya di Laut Timor melalui rancangan hukum dalam bentuk Perjanjian Laut Timor yang akan berlaku di tahun 2003. Ini akan memberikan kekuatan hukum pengembangan sumber daya minyak di Laut Timor tanpa adanya prasangka terhadap negosiasi-negosiasi batas permanen. Perjanjian ini memberikan Timor Lorosa'e 90 persen pendapatan royalti dari pengembangan sumber daya di Laut Timor dan memberikan ketentuan hukum yang dipersyaratkan oleh para investor pada saat sebuah batas perairan diselesaikan. Keluhan anda mengenai hilangnya pendapatan yang potensial bagi Timor Lorosa'e, oleh karenanya secara fakta tidak ada dasarnya.

Deklarasi Australia di Bulan Maret 2002 tidak termasuk penyelesaian batas perairan dari penyelesaian perselisihan yang mengikat oleh Pengadilan Internasional Keadilan dan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, mencerminkan pandangan kami yang kuat bahwa setiap penyelesaian perselisihan batas perairan paling baik diselesaikan dengan negosiasi daripada melalui litigasi. Ini tindakan secara khusus bahwa sekarang ini Australia telah berkomitmen dalam pembahasan dengan Timor Lorosa'e mengenai batas perairan permanen.

Terima kasih,

Traci Williams  
Sekretaris Ketiga

Teks dari surat ini akurat dan lengkap, layout ini merupakan simulasi komputer.

## Komentar dari La'o Hamutuk

Kebanyakan informasi yang salah mengenai isu ini datang dari para pejabat Australia, termasuk menyatakan secara resmi "prinsip kedalaman laut" yang tidak berlaku lagi, membantah perluasan yang penuh wilayah Laut Timor Timor Lorosa'e, dan memberlakukan perjanjian antara Australia-Indonesia terhadap Timor Lorosa'e.

Pertemuan Nopember 2003 diselenggarakan hanya setelah Timor Lorosa'e berulang kali memohon diadakannya pembahasan lebih dari setahun. Pada pertemuan itu, Timor Lorosa'e mengusulkan untuk bertemu setiap bulan hingga dicapai persetujuan. Australia mengklaim mereka tidak mempunyai sumber daya manusia untuk bertemu setiap bulan, dan pertemuan selanjutnya tidak akan diadakan hingga April 2004.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa negara-negara lain yang memiliki wilayah perairan yang tumpah tindih—Australia-Selandia Baru, Perancis dan Norwegia (dekat Antartika)—telah menunggu beberapa dekade untuk menyelesaikan perbatasan dengan negosiasi, bahkan tanpa minyak yang dipertaruhkan. Kebanyakan negara-negara lain menyelesaikan persoalan semacam ini dalam waktu dua-tiga tahun.

Wilayah ini dicakup oleh Perjanjian Laut Timor sekitar 40 persen sumber daya minyak yang lebih dekat ke Timor Lorosa'e daripada ke negara lain, yang semuanya milik Timor Lorosa'e menurut Prinsip-Prinsip Hukum Laut. Australia mengambil sisa 60 persen dan uangnya.

Ladang minyak Laminaria-Corallina lebih dekat sekali ke Pantai Timor Lorosa'e daripada Australia. Dua ladang minyak ini telah membayar sekitar 1 milyar Dolar Amerika ke Canberra sejak awal produksi di tahun 1999, dan tidak satu sen pun diperoleh Timor Lorosa'e. Semakin lama langkah untuk menyelesaikan perbatasan, pendapatan minyak Timor Lorosa'e akan lebih banyak dikantongi oleh Australia.

Peraturan hukum, termasuk mekanisme hukum internasional yang tidak memihak untuk menyelesaikan perselisihan perbatasan ada untuk melindungi yang kecil dan lemah dari pemangsa yang kaya dan kuat, juga untuk mendukung seluruh masyarakat suatu negara.

# Pembahasan Batas Perairan Berjalan Lamban

Seperti yang telah ditulis *La'o Hamutuk* sebelumnya (lihat, untuk contoh, *Buletin LH* Vol. 4, No. 3-4), mayoritas sumber minyak dan gas yang seharusnya milik Timor Lorosa'e menurut prinsip hukum internasional berada di bawah kekuasaan Australia selama Australia menunda perjanjian batas perairan permanent, dan Australia telah mengambil pendapatan pokok dari sumber-sumber minyak tersebut sejak 1999.

Hampir dua tahun yang lalu, Australia menarik diri dari keikutsertaannya dalam proses hukum untuk menyelesaikan perbatasan, dan di Bulan Oktober 2002 Pemerintah Timor Lorosa'e mengusulkan untuk memulai negosiasi. Australia menunda tanggapannya hingga kedua negara tersebut telah meratifikasi Perjanjian Laut Timor Sementara dan menandatangani sebuah perjanjian untuk membagi pendapatan dari ladang minyak *Greater Sunrise* dimana 82% untuk Australia.

Pembicaraan pertama mengenai perbatasan diadakan di Darwin pada tanggal 12 Nopember 2003. Timor Lorosa'e mengajukan pertemuan bulanan hingga permasalahan perbatasan diselesaikan, tetapi Australia hanya mau bertemu setiap enam bulan, dengan alasan mereka tidak mempunyai cukup uang dan orang untuk seringkali membahas persoalan batas perairan itu. Lihat halaman XX untuk melihat posisi Australia, dan tindakan mereka untuk mempertahankan posisinya.

Di Bulan Desember 2003, *La'o Hamutuk* menyatakan pada Pertemuan Para Penyandang Dana:

"...stabilitas ekonomi Timor Lorosa'e mensyaratkan bahwa kami menerima hak sesuai hukum penuh atas sumber daya kita. Kami terus diremehkan oleh keinginan Australia untuk mencuri minyak dan gas kita, seperti yang disimbolkan oleh penghabisan secara cepat ladang minyak *Laminaria-Corallina*. Ladang minyak ini milik Timor Lorosa'e menurut prinsip UNCLOS, tetapi Australia telah menerima sekitar satu milyar Dolar Amerika dari ladang minyak tersebut, yang menjadikan Timor Lorosa'e menjadi penyumbang luar negeri terbesar bagi anggaran nasional Australia."

Sejak pendekatan Australia yang tidak mau bekerja sama dalam pembahasan batas perairan tersebut, Pemerintah Timor Lorosa'e telah mendorong sebuah kampanye dari segala segi, seperti yang didesakkan oleh *La'o Hamutuk* dan lain-lainnya selama beberapa tahun. Perdana Menteri Mari Alkatiri telah memohon kepada Australia untuk menahan diri mengeksploitasi sumber daya minyak atau menandatangani kontrak-kontrak baru di wilayah yang diperselisihkan (sebuah permohonan yang diabaikan oleh Australia); pejabat dan diplomat Timor Lorosa'e telah menantang kekerasan hati Australia secara terang-terangan; Kantor Laut Timor Perdana Menteri menjangkau media dan telah membuat web site ([www.timorseaoffice.gov.tp](http://www.timorseaoffice.gov.tp)).

Bersama-sama dengan aktivis solidaritas di Australia,

Amerika Serikat dan seluruh dunia, *La'o Hamutuk* telah mendorong dan memfasilitasi kampanye internasional untuk menekan dan memalukan Australia untuk menghormati Timor Lorosa'e sebagai negara yang merdeka. Sebelum pembahasan di Bulan Nopember, lebih dari 100 organisasi dari 19 negara menulis kepada Perdana Menteri Australia

John Howard, mendesak pemerintahnya untuk menentukan jadwal penentuan batas perairan dalam waktu tiga tahun, dan memperlakukan Timor Lorosa'e "dengan adil dan sebagai bangsa yang berdaulat, dengan hak yang sama seperti Australia."

Pemerintah Australia menanggapi bahwa "proses [penentuan batas perairan] memerlukan waktu yang panjang dan kompleks. Berdasarkan pengalaman ini, Pemerintah Aus-

tralia tidak berpikir bahwa Australia pantas untuk menentukan akhir proses ini." Australia juga "tidak berencana untuk meninjau kembali keputusan mereka di Bulan Maret 2002 yang tidak menerima lagi yurisdiksi Pengadilan Keadilan Internasional (*International Court of Justice* dalam Bahasa Inggris) dan mekanisme penyelesaian perselisihan lain..."

Banyak masyarakat Australia berpikir sebaliknya, dan telah melaksanakan sebuah Kampanye Keadilan atas Laut Timor, pada awalnya di Melbourne. Kelompok ini menyerukan Pemerintah Australia untuk:

- Sesegera mungkin menegosiasikan batas perairan permanen dengan Timor Lorosa'e dengan itikad yang baik.
- Menghormati hukum internasional dengan menggabungkan diri kembali dalam mekanisme hukum untuk menyelesaikan perselisihan batas perairan dan setuju terikat oleh keputusan mereka.
- Menyimpan semua pendapatan Pemerintah Australia yang diperoleh dari ladang minyak dan gas yang lebih dekat ke Timor Lorosa'e daripada ke Australia ke dalam dana perwalian. Pada saat batas-batas permanen disetujui, dana perwalian harus dibagi menurut hak masing-masing negara.
- Menghentikan eksploitasi sumber-sumber minyak di wilayah yang diperselisihkan oleh satu pihak.

Australia memperingati hari nasionalnya pada tanggal 26 Januari, peringatan ke-216 pendudukan Inggris pertama di Australia. Di Timor Lorosa'e dan seluruh dunia, masyarakat mendebatkan dan mendesak dengan sungguh-sungguh kepada Canberra untuk memperlakukan Timor Lorosa'e dengan serius.

Jaringan kerja *Oilwatch*, sekretariat di Ekuador, mendukung usaha-usaha Timor Lorosa'e untuk mengamankan hak asasi atas sumber daya kita, sementara juga secara serentak membantu kita belajar dan semoga mencegah, "pengabaian sumber daya" yang menyebabkan kemiskinan, korupsi, penghancuran dan konflik kepada banyak



bangsa-bangsa yang kaya minyak. *La'o Hamutuk* berpartisipasi dalam pertemuan umum dua tahunan *Oilwatch* di Kolombia, September tahun lalu, dan bekerja dengan *Oilwatch* untuk mengorganisir pertukaran program Nigeria-Timor Lorosa'e di Bulan Januari (Laporan lengkap di Buletin edisi berikutnya). Bersama-sama dengan Pusat Informasi Independen mengenai Laut Timor, kami berpartisipasi dalam pertemuan *Oilwatch* Asia Tenggara di Bangkok di Bulan Pebruari (Lihat laporan di bawah) dan akan melanjutkan bekerja sama dengan lebih dekat dengan jaringan kerja ini di seluruh negara-negara di Selatan,



Para pendukung Timor Lorosa'e di Thailand mengadakan aksi di Hari Nasional Australia di luar Kedutaan Australia di Bangkok.

menghubungkan masyarakat di negara-negara berhutan tropis yang kaya minyak di seluruh dunia.

Bayu-Undan, ladang minyak dan gas terbesar di Wilayah Pengembangan Bersama di Laut Timor, memulai produksi percobaannya di pertengahan Pebruari, meskipun ini akan memakan waktu berbulan-bulan sebelum minyak yang penting secara ekonomis dapat dijual. Beberapa bulan ke depan, *La'o Hamutuk* akan melanjutkan memantau kegiatan-kegiatan di Bayu Undan, juga menganalisa rencana-rencana penggunaan dan pengamanan pendapatan dari minyak yang menjadi hak Timor Lorosa'e. ❖

## Industri Minyak dan Gas:

### Protes Masyarakat Korban Karena Tidak Sesuai Janji-Janji

Di Bulan Pebruari, Selma Hayati (*La'o Hamutuk*) dan Marcelino Magno (mewakili Pusat Informasi Independen tentang Laut Timor-CIITT) berpartisipasi dalam sebuah pertemuan *Oilwatch* Asia Tenggara, sebuah jaringan kerja kelompok masyarakat sipil yang memantau eksploitasi sumber daya alam gas dan minyak. Jaringan kerja *Oilwatch* yang berusia delapan tahun, bersekretariat di Ekuador dan di Timor Leste diwakili oleh *La'o Hamutuk*, menyatukan orang-orang dari negara-negara berhutan tropis di seluruh dunia untuk menentang konsekuensi negatif politik, lingkungan, ekonomi dan sosial.

Pertemuan dan konsultasi yang diorganisir oleh organisasi *Campaign for Alternative Industry Network (CAIN)*, *Greenpeace* Asia Tenggara, dan *Earth Rights International (ERI)* dihadiri oleh 18 organisasi non pemerintah, bertemakan Penangguhan Pembangunan Minyak dan Gas, 14-16 Pebruari 2004, di Bangkok, Thailand. Pertemuan juga dihadiri oleh wakil masyarakat Distrik *Chana*, Propinsi *Songkhla*, *Rayong*, *Chonburi*, *Phetchaburi*, Aliansi Masyarakat Desa Thailand-Malaysia di Thailand sebagai korban Pembangunan pipa saluran minyak Thailand-Malaysia. Pertemuan dua hari tersebut mendiskusikan beberapa isu penting dari masing-masing enam negara peserta, antara lain keterlibatan militer dalam industri minyak dan gas, *Trans* Pipa Saluran Gas di Wilayah ASEAN, energi alternatif, isu lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai dampak pembangunan industri minyak dan gas.

Hadirnya perwakilan masyarakat korban, termasuk suku *Arakan* di Burma (terletak di sebelah Barat Burma, diduduki oleh Burma pada tahun 1784; Inggris, 1824; dan sekarang di bawah junta militer *SLORC*), mampu merefleksikan bagaimana mitos pembangunan menjanjikan kesejahteraan bagi mereka tetapi sebaliknya justru merampas hak ekonomi, sosial dan budaya mereka. Pertemuan diakhiri dengan perjalanan ke lokasi pembangunan pipa saluran gas di perbatasan Thailand-Burma di *Kanchanaburi* dan berjalan kaki menjelajahi hutan sejauh 3 kilometer selama hampir empat jam untuk menelusuri pipa saluran gas antara Burma-Thailand-Malaysia yang melintasi pemukiman masyarakat *Chana*.

Berikut isu-isu penting yang sepakat untuk diperhatikan dan ditanggapi secara serius oleh jaringan kerja *Oilwatch* Asia Tenggara dengan dukungan Sekretariat *Oilwatch* Internasional:

#### Militer sebagai Anjing Penjaga bagi Perusahaan-Minyak dan Gas

Thailand, Burma, dan Indonesia merupakan negara yang secara sistematis memakai kekuatan militer untuk melindungi para pemilik modal dan negara dalam menyukseskan pembangunan industri minyak dan gas. Pembangunan proyek pipa saluran *Yadana/Yetagun* di *Arakan*, Burma dan proyek pipa saluran Wilayah Pengembangan Bersama (*JDA*) Thailand-Malaysia, kasus di Aceh dan Papua Barat di Indonesia memberikan bukti atas kesimpulan tersebut. Keterlibatan militer itu, antara lain dalam proses awal pembebasan tanah untuk proyek, selama proses pembangunan, dan paska pembangunan proyek dengan mengatasnamakan kesejahteraan rakyat dan keamanan nasional.

Terdapat fenomena dan bentuk-bentuk keterlibatan militer yang sama di tiga negara tersebut, yaitu kekerasan melalui intimidasi, penyiksaan, penembakan, penangkapan, pelecehan seksual terhadap perempuan di wilayah pembangunan industri, pembatasan terhadap hak untuk berpindah ke wilayah lain, pemindahan secara paksa masyarakat setempat yang terkena proyek, dan dalam proses hukum yang tidak adil bagi para korban. Contoh kasus nyata yang memberikan pengalaman kepada masyarakat setempat adalah penangkapan, penyerangan, dan penembakan terhadap masyarakat *Chana*, Propinsi *Songkhla* oleh militer Thailand pada tanggal 20 Desember 2002; perkiraan penambahan anggota militer di Negara Bagian *Arakan*, Burma yang sekarang telah berjumlah sekitar 30.000 personil dan 54 batalion; sistem pengamanan wilayah dan modal industri pengolahan minyak dan gas milik *ExxonMobil* di Aceh dan industri tambang Perusahaan multinasional *Freeport* di Papua Barat.

#### Dampak Negatif terhadap Lingkungan dan Sosial

"...tak banyak yang tertinggal yang bisa ditangkap di Laut." Kalimat ini diucapkan oleh *Horha Sansuwan*, nelayan, Desa *Ban Lae*, 500 meter dari Pelabuhan Laut Propinsi *Songkhla*, Thailand. Ucapan *Sansuwan* tersebut menjadi saksi atas perubahan lingkungan sebagai dampak pembangunan industri minyak dan gas. Pengolahan sumur minyak lepas pantai telah turut andil dalam perubahan ekosistem pantai dan laut dan

pengrusakan terhadap industri perikanan lokal. Sementara itu pembangunan industri minyak dan gas di sekitar pantai telah mengubah bentuk pantai karena abrasi (erosi karena air laut). Pengalaman masyarakat *Arakan* menggambarkan bahwa proses pembangunan pengeboran dan produksi *platform* lepas pantai telah menggunakan bahan kimia yang akan merusak kesehatan masyarakat yang tinggal di wilayah pantai.

Pembangunan pipa saluran dan industri minyak dan gas di wilayah-wilayah pantai telah mengubah mata pencaharian dan mengurangi pendapatan masyarakat lokal. Hal ini terjadi pada masyarakat yang hidup di sekitar wilayah industri bebas (*Free Trade Zone*) di *Map Ta Phut*, Propinsi *Rayong*, Thailand yang sebelumnya mayoritas bekerja sebagai nelayan menjadi berkurang pendapatannya, sehingga mendorong generasi muda mereka bekerja sebagai buruh industri. Industri berat yang bermacam-macam jenisnya telah memperburuk kondisi kesehatan mereka selama empat tahun terakhir karena bau tak sedap dan asap telah menyebabkan sesak nafas. Dimana kesejahteraan yang digembor-gemborkan oleh Pemerintah dan pemilik modal?

Berbeda dengan perubahan lingkungan di wilayah *Kanchanaburi* yang dilintasi oleh pipa saluran minyak dan gas bersama Thailand-Malaysia. Pengrusakan terhadap tanah dan pohon-pohon sebagai bagian dari ekosistem telah mengakibatkan gajah-gajah tak banyak lagi muncul di hutan sekitar penduduk, juga hilangnya tanaman pelindung terhadap lapisan tanah atas (*soil*) dan tentu saja perubahan ekosistem lainnya.

### Trans Pipa Saluran Gas di Wilayah ASEAN

Sistem ekonomi regional di wilayah anggota-anggota ASEAN telah menuntut dibangunnya jaringan energi regional. Dalam kesepakatan yang telah disetujui oleh beberapa negara anggota ASEAN dan negara industri di Asia, yaitu Jepang, Korea, Taiwan dan China "Rencana Kegiatan ASEAN dalam Kerja Sama Energi 1999-2004" akan membangun pipa saluran sepanjang 10,000 kilometer. Pipa Saluran Trans ASEAN tersebut akan melintasi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Tentu saja bisa ditebak dampak dari pembangunan pipa saluran antar negara tersebut, tak akan berbeda dengan yang terjadi

pada Proyek Yadana dan Proyek Bersama Thailand-Malaysia: konflik pertanahan dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya, baik di satu negara tertentu maupun di perbatasan antar dua atau tiga negara.

### Energi Alternatif

Penting bagi adalah masyarakat dan Pemerintah Timor Lorosa'e harus memikirkan energi alternatif yang mampu mengurangi ketergantungan atas minyak dan gas dan menciptakan energi yang akrab terhadap lingkungan. Pengembangan energi alternatif dapat dilakukan dengan mengembangkan energi yang bisa diperbaharui dan penghematan energi. Ada kebutuhan untuk menyebarluaskan informasi mengenai alternatif energi, dan kita bisa mengambil manfaat dari penggunaan energi alternatif: biogas, pengoperasian pembangkit listrik tenaga air mini, biodiesel, ethanol dan lain-lain, serta manajemen limbah yang komprehensif.

Hambatan secara umum adalah ketergantungan terhadap teknologi asing dan mahal. Kita memerlukan waktu yang lama untuk memahami pentingnya energi alternatif secara luas karena berbicara energi alternatif tidak hanya mendiskusikan sebuah kebijakan.

### Terus Mengorganisasir Diri: Pelajaran bagi Masyarakat Timor Lorosa'e

Memang persoalan pembangunan minyak dan gas di Laut Timor berbeda dengan kasus-kasus di atas. Namun masyarakat Timor Lorosa'e dapat belajar dari pelajaran yang baik negara-negara tetangga tersebut. Perlawanan-perlawanan masyarakat lokal di Thailand, Indonesia, Malaysia, Burma dan Thailand yang membangun organisasi masyarakat basis yang kuat adalah contoh yang baik. Membangun jaringan yang kuat atas kesadaran dan kepentingan yang sama antar masyarakat akan lebih efektif mendukung masyarakat Timor Lorosa'e dalam memperjuangkan kedaulatannya atas perbatasan perairan dengan Australia. Masyarakat Timor Lorosa'e masih perlu menumbuhkan kesadaran bahwa persoalan minyak dan gas di Laut Timor adalah persoalan bersama bukan hanya persoalan organisasi non pemerintah maupun Pemerintah RDTL saja. ❖

### Alisa Manlah: "Kesejahteraan? Kami Tidak Mendapatkan Apa-Apa"

Wajahnya yang dibalut jilbab selalu menebarkan senyum dan kata-katanya tegas. Alisa Manlah alias Rofiah (Nama Muslim) hanyalah salah satu perempuan yang kuat dari masyarakat *Chana*, yang melawan pembangunan pipa saluran gas Thailand-Malaysia.

Pertanggungjawaban moral sebagai muslim adalah komitmen awal yang tumbuh dari dirinya ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana toko makanan di Propinsi *Rayong* berfungsi ganda sebagai karaoke dan tempat prostitusi di bawah umur. Membaca, mencari informasi, mendiskusikan dampak negatif dari pipa saluran gas dan minyak yang melintasi kampungnya, dan mengorganisir diri dengan kawan-kawan sekampung dan kampung terdekatnya menjadi kegiatannya.

Ancaman pembunuhan dan tercantum dalam 'daftar cekal' tak menyurutkan keberaniannya. "Hukum tidak memihak kita. Militer dan polisi telah membantu perusahaan

minyak. Perusahaan multinasional lebih kuat dibandingkan pemerintah kami, mereka justru mendikte pemerintah. Kami tidak mendapatkan apa-apa, dimanakah manfaatnya. Ini persoalan keadilan yang harus kami tuntut," ucapnya dengan tegas.



Selama aksi protes 12 Desember 2002, kawannya sebanyak 20 orang ditangkap dalam protes keliling dan puluhan luka melawan pentungan dan tembakan 600 polisi. Proyek yang dibangun oleh Perusahaan Perminyakan Thailand dan *Petronas* Malaysia terus berlanjut. Warga delapan desa di Propinsi *Songkhla*, Thailand pun tetap melawan. Alisa dkk hidup di hutan selama dua bulan untuk menghentikan proyek. Hingga akhirnya pembangunan

pipa saluran gas itu berhenti tepat di depan lokasi tenda protes masyarakat di hutan. "Pasti Pemerintah akan melanjutkan proyek itu. Kami akan tetap melawan, memperjuangkan hak-hak kami," kata Alisa.

# Forum Sosial Dunia “Dunia Yang Lain itu Mungkin”

Mumbai, India 16-21 Januari 2004

Lebih dari 70.000 aktifis, serikat buruh, pekerja organisasi non pemerintah, wartawan, akademisi, utusan-utusan dari gerakan sosial, dan juru kampanye untuk hak-hak masyarakat adat dari berbagai belahan dunia berdatangan ke Mumbai (dulu Bombay), India guna menghadiri Forum Sosial Dunia ke-empat.

Forum Sosial Dunia merupakan salah satu tempat pertemuan bagi pihak-pihak yang “menentang neo-liberalisme dan penguasaan dunia oleh modal serta berbagai bentuk imperialisme, dan bertekad membangun suatu masyarakat yang dipusatkan pada orang-orang”. Forum Sosial Dunia merupakan suatu forum terbuka untuk membagi pemikiran dan pengalaman secara bebas. Forum Sosial Dunia mendukung praktek-praktek HAM dan demokrasi yang berlawanan dengan totalitarisme. Forum ini juga menentang berbagai bentuk dominasi dan penghinaan antara bangsa manusia. Sebaliknya Forum ini mendukung persamaan dan tenggang-rasa antara semua warga dari sudut pandang jenis kelamin, suku dan masyarakat. Badan ini juga menentang globalisasi yang dipacu oleh perusahaan-perusahaan tetapi memperjuangkan internasionalisme dan globalisasi dari bawah.

Ini merupakan Forum Sosial Dunia yang pertama di Asia. Forum ini dipindahkan ke Asia dari Porto Alegre, Brazil guna menjajaki forum kesetaraan dan memperlebar jaringannya di antara kelompok-kelompok yang berminat, serta untuk mengembangkan berbagai penyelesaian untuk masalah-masalah yang biasa. India merupakan lokasi yang sangat bagus karena penduduknya yang benar-benar sadar akan politik dan aktif dan merupakan salah satu tempat lahirnya sejarah gerakan-gerakan sosial terbesar: kampanye Satya Graha Gandhi bagi kemerdekaan dari Inggris.

Sedikitnya selama empat hari dalam Forum Sosial Dunia berbagai kelompok peserta menyelenggarakan seminar, diskusi panel, konferensi, lokakarya, kegiatan-kegiatan budaya, pertemuan-pertemuan solidaritas, demonstrasi dan pawai. Segala kegiatan ini berlangsung di dalam aula-aula konferensi, ruang-ruang seminar dan tenda yang di sekitar tempat pertunjukan. Jumlah dan keragaman berbagai kegiatan di atas sangat menyolok. Setiap hari ada sekitar 240 kegiatan yang berlangsung pada pagi hari, sore dan malam dengan topik yang berkisar dari keadilan internasional dan dampak globalisasi pada pertanian berkelanjutan hingga pelayanan kesehatan tingkat basis dan hak-hak masyarakat adat. Selanjutnya, program budaya diselingi dengan musik, teater, film dan dokumentasi dari berbagai belahan dunia.

## Peran Serta Timor Lorosa'e

Para peserta dari *La'o Hamutuk* dan Kelompok Kajian Lembaga Keuangan Internasional terdiri dari Tomas Freitas, Mateus Goncalves, Bencio da Costa Belo dan Simon Foster. Peserta lainnya dari Timor Lorosa'e adalah Ego Lemos dari *Hasatil*, Maria Immaculada dari *Haburas* dan Riguberto



Monteiro dari *KSTL*. Delegasi dari Kelompok Kajian Lembaga Keuangan Internasional dan *La'o Hamutuk* berusaha menghadiri berbagai kegiatan semampu mungkin yang terbagi ke dalam banyak kelompok. Berikut sejumlah kegiatan tersebut.

## Konferensi: Globalisasi, Pemerintahan Global dan Negara Bangsa

Suatu panel menyajikan pandangan-pandangan mengenai berbagai dampak terhadap negara bangsa. Para panelis melibatkan para akademisi dari India, Eropa dan Amerika Selatan termasuk mantan Komisi Tinggi HAM PBB, Mary Robinson. Para panelis membagikan berbagai pandangan yang berbeda. Sebagai contoh, Aijiaz Ahmed dari India mendiskusikan bagaimana globalisasi telah menyebabkan negara-negara kurang bertanggungjawab terhadap warga negaranya tetapi sebaliknya lebih bertanggungjawab terhadap perusahaan dan investor internasional. Liberalisasi dan deregulasi ekonomi mengharuskan negara-negara mengurangi perlindungan sosial bagi warga negaranya, walaupun masalah-masalah sosial memperkuat peranan polisi dan kekuatan keamanan dalam negeri. Mary Robinson menyatakan bahwa peraturan-peraturan perdagangan yang sekarang tidak adil dan menguntungkan negara-negara maju, tetapi perdagangan yang meningkat dapat menguntungkan semuanya. Badan-badan perdagangan multilateral yang ada dan mahkamah internasional dapat memulihkan kembali keseimbangan.

## Seminar: Swastanisasi Air di Asia

Seminar tersebut, salah satunya membicarakan tentang swastanisasi air, difokuskan di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Para peserta mendiskusikan swastanisasi dari berbagai aspek seperti penyediaan dan penggunaan air, termasuk pembangkit listrik tenaga air. Para penyaji dari Filipina menyampaikan bagaimana swastanisasi menyebabkan harga air terlalu mahal bagi kebanyakan orang, disebabkan perusahaan-perusahaan air yang enggan menanam modal di bidang infrastruktur di daerah-daerah yang lebih miskin. Sementara banyak kalangan mendiskusikan berbagai dampak negatif dari swastanisasi air di negara-negara berkembang lainnya, para peserta dari India mengakui bahwa pengelolaan umum air di India sangat meresahkan. Topik-topik yang lain meliputi pembaharuan di sektor publik, rekanan publik/swasta dan air sebagai bagian dari hak-hak azasi manusia. Kami menghadiri seminar ini agar belajar lebih banyak lagi bagaimana rakyat di negara-negara lain telah mengembangkan sumber daya air mereka dalam suatu cara yang lebih seimbang.

## Seminar: Keterlibatan Laki-laki dalam Isu-isu Jender

Empat pembicara dari koalisi internasional yang dinamakan *Men against Violence and Abuse* (Laki-laki Menentang Kekerasan dan Pelanggaran-Red) memberikan presentasi



mengenai keterlibatan kaum laki-laki dalam upaya menghentikan kekerasan-kekerasan seksual yang berbasis gender. Diskusi tersebut melebar ke dalam peranan kaum laki-laki dalam isu-isu jender. Anggota-anggota koalisi berada dari Bangladesh, Malaysia, Pakistan dan India berbicara tentang memerangi kekerasan rumah tangga melalui lokakarya pada tingkat masyarakat akar rumput (basis). Keterlibatan kaum laki-laki penting di dalam perubahan-perubahan sosial dan budaya yang rumit yang dibutuhkan untuk mengurangi ketidaksetaraan jender, khususnya karena kebanyakan laki-laki memahami perubahan-perubahan tersebut sebagai serangan terhadap peranan mereka yang turun-temurun sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah.

### Seminar: Aksi Solidaritas untuk Asia Pasifik

Tomas Freitas dari *La'o Hamutuk* berbicara mengenai situasi terkini di Timor Lorosa'e pada sebuah seminar yang diselenggarakan oleh *Action Solidarity for Asia Pacific* (Aksi Solidaritas untuk Asia Pasifik-Red). Isu kuncinya ialah kurangnya kemauan internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan (Lihat *Buletin La'o Hamutuk* Vol. 4, No. 2) dan lemahnya sistem peradilan dalam negeri. Isu kedua ialah situasi ekonomi Timor Lorosa'e dewasa ini. Sebagai hasil kelicikan dan tiadanya itikad baik dari Australia dalam perundingan Laut Timor, Timor Lorosa'e tengah menghadapi defisit anggaran hingga diperoleh pendapatan dari pengolahan minyak. Australia telah mengambil lebih dari satu miliar dolar dari ladang-ladang minyak yang seharusnya dimiliki Timor Lorosa'e menurut prinsip-prinsip hukum internasional. Lihat halaman 5.

### Presentasi Panel: Rekonstruksi Pasca Konflik

Mateus Goncalves dari *Sa'he Institutu ba Libertasaun* berpartisipasi di dalam suatu panel mengenai rekonstruksi pasca konflik dengan para pembicara yang datangnya dari Kamboja, Afghanistan dan Irak. Badan-badan internasional telah merancang lembaga-lembaga pemerintahan dan administrasi sejak 1999. Secara khusus, lembaga-lembaga keuangan internasional memainkan peranan kunci dalam Otoritas Perbankan dan Pembangunan dan Kementerian Keuangan serta tetap berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi Timor Lorosa'e. Rakyat Timor Lorosa'e merasa dikucilkan dari proses rekonstruksi tersebut. Semua penyaji menekankan kurangnya rasa memiliki dan mengontrol seputar berbagai kegiatan masyarakat internasional.

### Film: Pasukan Penjaga Keamanan dan Perempuan

Film dokumenter yang diambil oleh pembuat film Jerman Karin Jurschick menyoroti hubungan antara pasukan penjaga perdamaian PBB dan perdagangan perempuan dalam perdagangan seks yang meningkat di Kosovo. Pihak berwenang PBB membutuhkan waktu yang lama untuk mengemban tanggungjawab, khususnya para klien yang

merupakan staf PBB. Desakan akan aksi diprakarsai sendiri oleh orang-orang dari dalam PBB, lebih-lebih seorang perwira polisi PBB yang dipulangkan ke rumah setelah mengingatkan para anggota seniornya. Pihak berwenang PBB kemudian membentuk sebuah tim khusus untuk merazia tempat-tempat pelacuran yang dicurigai. Diangkatnya seorang wartawan perempuan, yang pada awalnya sangat kritis terhadap PBB, untuk mengepaloi kelompok tersebut memberikan suatu tampilan politis dari solusi yang sebenarnya. Apalagi, kelompok tersebut lebih fokus pada para pekerja seks, yang lebih sering menjadi pihak yang didagangkan dan rawan, daripada klien mereka sendiri.

### Tindak Lanjut

Pada bulan Pebruari Tomas Freitas dan Simon Foster memberikan dua penyajian, yang pertama pada sebuah lokakarya untuk kelompok para petani yang diselenggarakan oleh *Hasatil* di Maubara dan yang kedua untuk para staf *La'o Hamutuk*. Lokakarya di Maubara yang diorganisir *Hasatil*, berlangsung pada hari terakhir dari sesi pelatihan selama tiga minggu di bidang pertanian berkelanjutan di kalangan kelompok-kelompok petani dan berbagai organisasi non pemerintah yang berdatangan dari seluruh Timor Lorosa'e, demikian juga halnya

para peserta dari Maubara. Lokakarya tersebut dimaksudkan untuk membagi gagasan dan pengalaman dari Forum Sosial Dunia. Diskusi tersebut berkisar pada globalisasi dan perdagangan internasional, khususnya pengaruh perusahaan-perusahaan internasional di bidang pertanian, demikian juga isu-isu seputar hak paten benih dan penggunaan sistem pertukaran non-anggaran. Para peserta sepakat akan pentingnya berpikir secara lokal dan berkelanjutan serta untuk memfokuskan pada kebutuhan rakyat.

Forum Sosial Dunia merupakan suatu kesempatan bagi para peserta Timor Lorosa'e untuk memperkuat jaringan dengan para aktifis dari Asia, khususnya Indonesia. Bersama dengan para aktifis Indonesia, peserta Timor Lorosa'e membuat rencana-rencana untuk mengorganisir dan berperan serta di dalam suatu Forum Sosial Indonesia.

Dalam situasi terkini, di mana lembaga-lembaga keuangan internasional menguasai debat-debat di bidang kebijakan dan prakarsa-prakarsa pembangunan dari bawah sering tidak ditanggapi, Forum Sosial Dunia memainkan suatu peran sangat penting dalam menggabungkan suara-suara dan pandangan-pandangan dari masyarakat sipil internasional. Forum Sosial Dunia tetap berperan penting dalam menciptakan suatu budaya politik global yang menyambut baik debat terbuka, tidak hanya sebagai suatu nilai demokrasi, tetapi juga sebagai satu-satunya jalan untuk sampai pada keadilan dan selanjutnya merumuskan strategi-strategi efektif dan alternatif-alternatif yang meyakinkan. Kami berharap bahwa tahun mendatang lebih banyak aktifis Timor Lorosa'e akan dapat berperan serta. ❖



Ego Lemos dari Timor Lorosa'e anggota "New Cinco do Oriente" dan juga HASATIL bersama Gilberto Gil, Menteri Kebudayaan Brasil di Forum Sosial Sedunia.

# La' o Hamutuk Membutuhkan Anda!

**Kami membutuhkan seorang aktifis Timor Lorosa'e dan internasional untuk bergabung bersama-sama dengan staf kami.**

Setiap anggota staf di *La' o Hamutuk* bekerja secara berkolaborasi dengan staf lain untuk melaksanakan penelitian dan melaporkan kegiatan-kegiatan lembaga internasional dan pemerintah-pemerintah asing di Timor Lorosa'e. Para anggota staf berbagi tanggung jawab untuk kerja-kerja administrasi dan program, meliputi penerbitan *Buletin La' o Hamutuk* dan *Surat Populer*, program radio, pertemuan publik, advokasi, pendidikan populer, koalisi dengan organisasi-organisasi masyarakat Timor Lorosa'e, dan pertukaran program dengan masyarakat di negara-negara lain. Masing-masing anggota staf bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan paling tidak satu kegiatan utama *La' o Hamutuk*.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai *La' o Hamutuk*, lihat halaman belakang *Buletin* ini atau web site kami di <http://www.etan.org/lh>.

## Persyaratan

- √ Berlatarbelakang, berpengalaman, dan berorientasi aktifis
- √ Komitmen yang kuat terhadap proses pembangunan yang demokratis dan transparan di Timor Lorosa'e
- √ Berkomitmen untuk berbagi keahlian dan mendukung kemampuan staf-staf lain
- √ Bertanggungjawab, dengan etika kerja dan kemauan yang kuat untuk bekerja secara bersama-sama dan kreatif dalam kondisi budaya yang beraneka ragam
- √ Pemahaman dan kemauan untuk bekerja menentang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin
- √ Berkeahlian menulis dan komunikasi secara lisan yang baik
- √ Berkemampuan untuk menyampaikan informasi yang sesuai fakta dari laporan investigasi
- √ Sehat fisik dan psikologi
- √ Berkemampuan untuk berkomitmen bekerja dengan *La' o Hamutuk* paling tidak satu tahun
- √ Lebih diharapkan berpengalaman sebagai seorang pekerja hak asasi manusia
- √ Lebih diharapkan berpengalaman dalam pembangunan internasional, penelitian kebijakan, dan/atau solidaritas internasional

## Persyaratan Tambahan bagi Calon Staf Internasional

- √ Fasih berbicara dan menulis dalam Bahasa Inggris (diharapkan orang yang berkeahlian Bahasa Inggris sebagai bahasa asli)
- √ Berkeahlian organisasi dan komputer
- √ Berpengetahuan mengenai sejarah dan politik Timor Lorosa'e
- √ Berpengalaman hidup dan bekerja di negara sedang berkembang; tertarik dan berkemampuan hidup secara sederhana
- √ Fasih atau berkemauan untuk belajar Tetum
- √ Lebih diharapkan berkemampuan Berbahasa Indonesia dan/atau Portugis

## Persyaratan Tambahan bagi Calon Staf Timor Lorosa'e

- √ Fasih berbahasa Tetum dan Bahasa Indonesia, dan berkemampuan untuk menulis dan menerjemahkan dalam kedua bahasa tersebut
- √ Mempunyai ketrampilan dasar organisasi dan komputer, dan berkemauan untuk meningkatkan ketrampilan tersebut
- √ Lebih diharapkan berkeahlian dalam penelitian, dengan kemampuan menulis sesuai fakta dan jelas
- √ Lebih diharapkan berkemampuan Bahasa Inggris dan/atau Portugis

**Untuk melamar, bawalah dokumen-dokumen** berikut ini ke kantor kami di Farol (Di sebelah Perkumpulan HAK dan *Sa'he Institutu ba Libertasaun*) atau kirimkan email ke alamat email: [laohamutuk@easttimor.minihub.org](mailto:laohamutuk@easttimor.minihub.org)

1. Surat yang menjelaskan alasan-alasan anda untuk bekerja dengan *La' o Hamutuk*
2. Curriculum vitae (CV) atau riwayat hidup
3. Dua surat dukungan dari organisasi atau menejer organisasi di mana anda bekerja sebelumnya
4. Contoh tulisan anda mengenai proses pembangunan (satu halaman atau lebih)

**Lamaran-lamaran akan dipertimbangkan setelah kami terima.** Bagi para pelamar staf Timor Lorosa'e, batas waktu terakhir tanggal 16 April. Kami juga berharap untuk mempunyai paling sedikit satu staf internasional baru pada Bulan Juni.

Perempuan secara khusus didorong untuk melamar.

*La' o Hamutuk* juga mencari seorang staf Timor Lorosa'e dengan keahlian keuangan. Silakan melamar sesegera mungkin.

## Dengarkan Program Radio La' o Hamutuk

Wawancara dan komentar mengenai isu-isu yang kami investigasi dan isu-isu lainnya dalam Bahasa Tetum dan Indonesia:

Setiap Hari Sabtu pukul 11.00 pagi  
di Radio Timor Leste dan Radio Timor Kmanek.

## Editorial

(Kelanjutan dari halaman 12)

Tan nee, ami hatene konseitu “libertasaun” neebe Estadus Unidus toka bei-beik. Ho konseitu nee Estadus Unidus fo apoiu ba Suharto hodi invade ami rain iha 7 Dezembru 1975 no fo apoiu nafatin durante okupasaun ilegal rezime militar brutal nee too iha 1999. Ninian konsekuensia mak okupasan durante tinan rua nulu resin haat kuaze ema rihun atus rua mate no lakon; labarik barak lakon sira inan-aman no membru familia seluk. Ohin loron ami hanoin katak esperiensia ida hanesan mos sei mosu ba ami nian belun sira iha rai Irake tomak. Iha tinan kotuk, ami Timor sai hamutuk ho ema hirak neebe hadomi paz no justisa iha mundu tomak hakilar kontra invazaun no funu iha Irake. Maske Estadus Unidus la rona ami hodi hamosu dezastre barak iha mundu nee, ohin loron ami dala ida tan ho neon ida laran ida hamutuk ho ema ema rai-klaran katak ami kontinua nafatin kontra okupasaun ilegal iha Irake tanba okupasaun nee sai nuudar imperializmu foun ida iha mileniu terseiru nee.

Ami hirus tanba Estadus Unidus hateten ona katak sira sei la husik rai Irake iha fulan Juniu 2004 tanba ami hanoin ema barak mak sei monu tenik. Tan nee ho hanoin atu haburas fini demokrasia no paz iha Irake no atu ema Irake la mate teni ami ejije atu:

- Estadus Unidus, hamutuk ho ninian koalizaun sira atu foti ian la-lais husi Irake hodi nunee povu Irake bele determina sira nian futuru rasik.
- Estadus Unidus hakotu kedas husi ohin ba oin sira politika intervensaun iha rai mundu rai-klaran atu atinji ninian interese politika.



- Komunitade internasional, liu husi ONU, atu harii tribunal internasional ida atu kondena autor hirak neebe diriji invazaun iha Irake, hanesan mos tribunal internasional ida neebe julga Suharto no ninian jeneral sira seluk neebe komete krime kontra umanidade iha Timor Leste.

*Dili, 20 Marsu 2004*

*Loron internasional kontra okupasaun iha Irake*

La' o Hamutuk, Insitutu Sahe ba Libertasaun (SIL), Judicial System Monitoring Program (JSMP), Perkumpulan HAK, Asosiasaun Journalista Timor-Leste (AJTL), Arte Moris, Hametin Sustainibelidade Agrikultor Timor-Leste (HASATIL), Dai Popular, Movimentu Nasional Kontra Violensia (MNKV), Asosiasaun Mane Kontra Violensia (AMKV), NGO Forum Sekretariat, Lalenok ba Ema Hotu (LABEH).

*La' o Hamutuk* telah menambahkan informasi terbaru di dalam CD-ROM *OilWeb* kita. Lebih dari 150 CD sumber informasi penting ini telah dibagikan di seluruh dunia. Edisi terbaru menambahkan laporan-laporan dari kegiatan Hari Australia, negosiasi Australia-Timor Lorosa'e, website Kantor Laut Timor, dan banyak artikel mengenai latar belakang batas perairan, kebijakan Australia, keterbukaan, dana-dana minyak, “pengabaian sumber daya”, korupsi, perubahan iklim, dan isu-isu lain yang relevan. CD-ROM ini juga berisikan kontrak-kontrak untuk pengolahan ladang minyak Bayu-Undan antara perusahaan-perusahaan minyak dan Otoritas Perancangan Laut Timor (TSDA), juga informasi keuangan dan teknis terbaru mengenai keuangan dan proyek-proyek perminyakan Timor Lorosa'e. Semua informasi asli – analisa sejarah dan politik, bahan-bahan audiovisual, dll. – masih dalam edisi terbaru, yang berisikan lebih dari 2000 data.

CD-ROM ini tersedia di kantor kami di Dili dan beberapa distributor internasional; seharga 2 Dolar Amerika bagi para pendukung Timor Lorosa'e dalam kampanye Laut Timor, 50 Dolar Amerika bagi lembaga-lembaga.

## Siapa di La' o Hamutuk?

**Staf La' o Hamutuk:** Cassia Bechara, Simon Foster, Tomas (Ató) Freitas, Selma Hayati, Mericio (Akara) Juvinal, Yasinta Lujina, Inês Martins, Charles Scheiner, João Sarmento

**Penerjemah:** Xylia Ingham, Nino Sari, Kylie

**Dewan Penasehat:** Sr. Maria Dias, Joseph Nevins, Nuno “Cailoro” Rodrigues, Pamela Sexton, Aderito de Jesus Soares

**Foto:** Ató Freitas (halaman 1), CAIN/Thailand (6), Selma Hayati (7), Simon Foster (8), Tom Fawthrop (9), Charles Scheiner (11, 12).

**Gambar:** Cipriano Daus (5)

# Editorial: Estados Unidus Tenki Respeita Soberania Ema Irake No Paz Global

*Ema Timor liu nain lima nulu ho ema solidaridade internasional nain hirak, halao demonstrasaun ho paz iha dia 20 de Marsu kontra okupasaun husi Estados Unidos nebe mak to'o agora sei iha Irake. Demonstrasaun ida ne'e hanesan parte ida husi protestu nebe mak halao iha mundu tomak. Deklarasaun ida ne'e le'e iha Embasada Estados Unidus nia oin iha Dili.*

Iha loron nee iha tinan ida liu ba Estados Unidus, neebe hetan apoia husi Inglaterra, Australia no Forsa Koalizaun, invade Irake atu buka atu hetan programa Saddam nian kona ba arma destroisaun masa neebe tuir sira bele sai ameasa ba estabilidade mundu. Maibe hodi invade Irake Estados Unidus ho ninian aliadu sira la respeita soberania nasaun Irake, prinsipiu direitus umanus, li-liu direitu povu Irake atu hili sira futuru rasik. Invazaun nee neebe sei tuir mos ho ninian okupasaun ilegal mosu depois Estados Unidus ho ninia forsa aliadu sira taka tilun ba ema liu tokon sanulu iha mundu tomak neebe hakilar kontra invazaun hasoru no funu iha Irake. Sira mos la rona Nasoens Unidus neebe la simu atu uza forsa maibe sujere atu kontinua negosiasiun pasifika no inspesaun atu haree tuir arma destroisaun ruma iha Irake.

Hans Blix, xefe grupu investigasaun ONU molok Estados Unidus ninian invazaun, haktuir katak sira la hetan arma destroisaun masa ruma iha Irake, hodi la fornese razaun Estados Unidus ho ninian koalizaun sira atu invade hodi nunee lao tuir nafatin sira nian gostu imperializmu atu kontinua invazaun hodi nunee oprimi no oho nafatin povu Irakianu, li-liu labarik kiik no fetu sira. Maibe foin la-lais nee iha fulan kotuk liu ba Prezidente George Walker Bush foin rekoniese katak Irake la iha arma destroisaun masa. Prezidente Bush dala barak dehan katak "Sadam Hussein suporta terorista hanesan Al-Qaeda" maibe nia rasik la iha prova ida atu tulun ninian deklarasaun.

Bainhira Estados Unidus ho ninian forsa hakarak diak invade Irake no kaer tiha Saddam, Bush haktuir dehan katak nia salva tiha ona povu Irake husi opresaun Saddam Hussein liman tanba sira iha responsabilidade atu liberta povu Irake husi ditadura Saddam Hussein. Maibe liberta povu Irake oinsa?

Situasaun ohin loron iha Irake hatudu rasik katak ema barak mak mate no sei mate mate tan. Ema hirak neebe hetan terus husi invazasaun no okupasaun ilegal nee mos hetok barak liu tan. Forsa imperializmu nunka lori libertasaun. Estados Unidus so hatene deit oho ema liu husi blokeia ekonomia neebe halo labarik barak mate hamlaha no nega povu nian direitu atu determina rasik sira nian futuru.

Estados Unidus ibun boot tebes atu koalita kona ba demokrasia, liberdade, direitus umanus maibe realidade hatudu mo-mos katak Estados Unidus hatuur no tulun rezime ditadura iha mundu tomak, hanesan Saddam Hussein iha Irake no Suharto iha Indonezia, hodi nega mat-matak violasaun direitus umanus neebe rezime hirak nee halo hasoru emar Irake no Indonezia, inklui Timor Leste. Durante tinan 1960 no 1970 laran Estados Unidus treina ditadura militar sira iha Amerika Latina atu halao tortura ba sira povu.

*(Lanjutan ke halaman 11)*



## Apakah La'o Hamutuk itu?

*La'o Hamutuk* (Berjalan Bersama) adalah sebuah organisasi Timor Lorosa'e yang memantau, menganalisis, dan melaporkan tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Lorosa'e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini. *La'o Hamutuk* berkeyakinan bahwa rakyat Timor Lorosa'e harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses ini dan bahwa proses ini harus demokratis dan transparan. *La'o Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi rakyat Timor Lorosa'e yang efektif. Selain itu, *La'o Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara masyarakat internasional dengan masyarakat Timor Lorosa'e. Staf *La'o Hamutuk* baik itu staf Timor Lorosa'e maupun internasional mempunyai tanggungjawab yang sama dan memperoleh gaji. Terakhir, *La'o Hamutuk* merupakan pusat informasi, yang menyediakan berbagai bahan bacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor Lorosa'e dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model-model pembangunan alternatif.

*La'o Hamutuk* mempersilakan kepada mereka yang ingin menyalin kembali buletin atau foto yang ada dalam buletin dengan gratis. Buletin dan foto yang disalin harus tetap mencantumkan nama *La'o Hamutuk* sebagai sumber utamanya.

*Dalam semangat mengembangkan transparansi, La'o Hamutuk mengharapkan anda menghubungi kami jika mempunyai dokumen dan atau informasi yang harus mendapatkan perhatian rakyat Timor Lorosa'e serta masyarakat internasional.*